

PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERBASIS KOMUNITAS STUDI KASUS PAGUYUBAN KALIJAWI, YOGYAKARTA

Yusak Senja Utama

ARKOM Yogya dan Magister Arsitektur, Universitas Kristen Duta Wacana
Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 5-25, Yogyakarta, 55224
Email: yusakutama@gmail.com

Abstrak

Konsentrasi penduduk di perkotaan terus meningkat setiap tahun dan menimbulkan beragam masalah. Perencanaan dan pembangunan perkotaan jika tidak melibatkan partisipasi masyarakat, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sejalan dengan hal itu, Pretty dan Guijt (1992) dalam Mikkelsen (2001) menjelaskan tentang implikasi praktis dari pendekatan partisipatoris, yaitu pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu proses pembangunan juga meliputi meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengusahakan kemauan masyarakat untuk ikut dalam proses penentuan tentang segala hal yang akan berdampak untuk mereka. Bukan mengabadikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi negara dan masyarakat (Theresia et al, 2014). Pada umumnya warga pada permukiman informal tidak dapat mengakses dana pembangunan dari pemerintah karena masalah ekonomi dan administratif. Paguyuban Kalijawi sebagai organisasi masyarakat yang sebagian besar anggotanya berada pada kawasan informal bantaran sungai Gajahwong dan Winongo, melakukan perencanaan dan pembangunan kawasan secara partisipatif sebagai proposal kolektif untuk pemerintah. Penelitian ini akan menyajikan studi kasus yang dilakukan Paguyuban Kalijawi di Yogyakarta untuk mengusahakan kawasan yang layak huni. Tujuan penelitian ini adalah menawarkan cara pandang alternatif terhadap pemikiran arus-utama (mainstream) dalam pembangunan kota yang umumnya dipahami sebagai tugas utama negara dan sektor bisnis (pengembang). Pengumpulan data melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan secara partisipatif yang dilakukan Paguyuban Kalijawi dapat dinilai sebagai inovasi dalam melakukan pembangunan pada kawasan perkotaan.

Kata kunci: masalah perkotaan, partisipasi masyarakat, Paguyuban Kalijawi, inovasi pembangunan

Abstract

Title: *People-driven Development: Case study Kalijawi association, Yogyakarta*

The number of population concentrated in urban areas increases every year and causes a variety of problems. Without th participation of people, urban planning and development will most possibly create problems in the future. Relatedly, Pretty and Guijt (1992) in Mikkelsen (2001) explains the practical implication of participatory approach that should start from those who know best their own situation and social system. Consequently, development process consists of capacity development of people and of encouraging people to involve in the process of deciding everything that will affect their life. It should not maintain the dependency of the people to the government (Theresia et al. 2014). In general, people in informal settlements are denied the development fund from government due to economic and administrative reasons. Kalijawi Association as a people organization whose members mostly reside in the banks of Gajahwong and Winongo rivers conducted area planning and development in a participatory way and proposed the result to the government. This research will use as a case study what Kalijawi Association has conducted in their struggle for decent settlements. This research aims to offer an alternative to mainstream perspective which generally sees the state and business sector (developers) as the main players in

urban development. Data collection is done through interview, observation and literature review. This research shows that participatory kampung improvement implemented by Kalijawi Association can be considered as innovation to urban development.

Keywords: *urban issues , participation , Kalijawi Organization , innovation development*

Pendahuluan

Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan Perkotaan Yogyakarta. Salah satunya adalah menggandeng investor untuk ikut bekerja sama dalam menanamkan investasi. Investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian. Karena investasi mampu meningkatkan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah. Apabila investasi terus bertumbuh maka akan terjadi perluasan kesempatan kerja dalam perekonomian. Hal ini merupakan tanda bahwa pemerintah Kota Yogyakarta sangat mendorong pertumbuhan investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Sementara menurut Korten (1984) dalam Theresia, et al (2014), pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan pertumbuhan ekonomi semata.

Urbanisasi merupakan salah fenomena yang membuat kota menjadi penuh dengan datangnya sebagian besar penduduk dari pinggiran kota untuk meningkatkan ekonomi mereka. Menetapnya masyarakat yang melakukan urbanisasi ini dirasa membebani kota dan mempengaruhi citra kota dengan menempati daerah yang belum termanfaatkan maksimal oleh pemangku kekuasaan. Sebagian besar masyarakat pada permukiman informal ini juga bekerja sektor informal dan lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka. Menurut Haris

(2011) sumbangan sektor informal dalam perkembangan perekonomian sangat memegang peranan penting dalam perekonomian kota. Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah gejala negatif, namun lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional.

Paguyuban Kalijawi merupakan organisasi masyarakat yang hadir karena adanya berbagai masalah pada kawasan permukiman informal. Beranggotakan mayoritas ibu-ibu yang berada di bantaran Kali Gajahwong dan Winongo. Kegiatan yang mereka lakukan lebih pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman untuk tercapainya kawasan yang layak huni secara partisipatif. Proses yang dilalui adalah dengan melakukan indentifikasi wilayah bersama mengenai masalah pada permukiman yang dapat mempengaruhi perkotaan seperti, sistem drainase dan sanitasi buruk, permukiman padat, kurangnya ruang terbuka hijau, dan akses jalan tidak baik. Perencanaan kawasan dan pembangunan dilakukan mandiri oleh masyarakat ini karena tidak dapat mengakses program dari pemerintah dan biasanya karena masalah administratif. Maka, dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana proses pembangunan yang dilakukan mandiri oleh kelompok masyarakat ini dapat menjadi salah satu inovasi pembangunan di luar skema yang

pemerintah miliki dan dapat menyumbangkan perbaikan kawasan perkotaan. Proses-proses pembangunan perkotaan berbasis komunitas yang dilakukan oleh Paguyuban Kalijawi ini juga dapat dimaknai sebagai kritik dan alternatif terhadap cara pandang umum bahwa pembangunan perkotaan hanya merupakan tugas pemerintah dan sektor bisnis (pengembang).

Landasan Teori

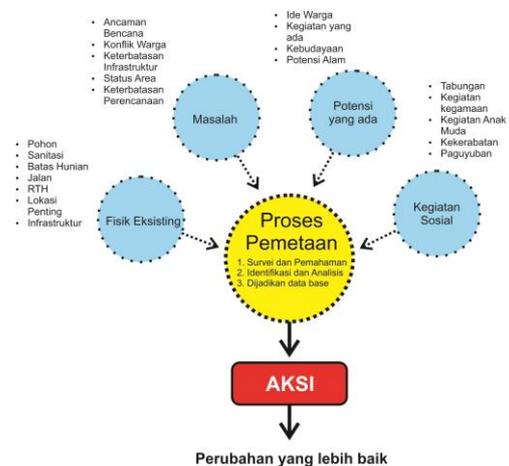
Aglomerasi diartikan sebagai penghematan akibat adanya lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan pengelompokan perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen secara spasial untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi dan komunikasi (Montgomery, 1988).

Menurut Perroux (1950), untuk mencapai pertumbuhan yang mantap dan berimbang diperlukan konsentrasi investasi pada sektor-sektor tertentu yang unggul (*leading sectors*). Dalam perkembangan selanjutnya akan terjadi suatu proses seleksi alam sehingga suatu sektor akan makin penting, sementara sektor lainnya justru menghilang. Hal ini dapat menciptakan daya tarik baru pada suatu lingkungan. Secara umum makin besar daya tarik, maka makin banyak masyarakat atau konsumen yang akan menuju ke tempat tersebut untuk menikmati segala fasilitas yang ada. Namun keterbatasan lahan menjadi salah satu masalah yang menimbulkan perumahan kumuh informal perkotaan. Permukiman kumuh merupakan suatu indikasi yang nyata ketika kebutuhan pokok perumahan tidak dapat terpenuhi dengan baik. Pada banyak kasus, masyarakat miskin-lah yang biasanya menjadi pelaku pengadaan perumahan kumuh

(<http://mjaniatan.staff.uns.ac.id/2008/1/10/permasalahan-perumahan/>).

Dalam <http://76.blogspot.com/2013/09/pemahaman-permukiman-onformal.html> Hamida (2013) menjelaskan bahwa mengenai peraturan kepemilikan tanah, pembangunan tanah dan bangunan terdapat definisi perumahan yang lebih mengarah kepada pasar perumahan. Secara garis besar terbagi dalam dua sektor, formal dan informal. Sektor formal mengacu pada pembangunan perumahan yang dibangun berdasarkan beberapa peraturan pembangunan dan melalui prosedur legal. Sedangkan sektor informal mengacu pada pembangunan tanpa melalui peraturan pembangunan dan tanpa melalui prosedur legal.

Menurut *Asian Coalition for Housing Right (ACHR)*, 2011 pemetaan adalah sarana yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas komunitas. Pemetaan juga merupakan proses untuk mengerti apa yang sedang terjadi dalam komunitas baik fisik maupun sosial, bekerja bersama, dan melakukan apa yang dapat dilakukan menuju komunitas dan lingkungan yang lebih baik.



Gambar 1. Konsep pemetaan komunitas ACHR

Sumber: ACHR, 2011

Selaras dengan hal tersebut di atas mengenai proses pemetaan sebagai pintu masuk untuk melakukan aksi demi perubahan yang lebih baik, Mardikanto (2010) dalam Theresia, et al (2014) menyatakan tahapan pembangunan berbasis masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa tahapan.

1. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja.
2. Sosialisasi kegiatan
3. Penyadaran masyarakat
4. Pengorganisasian masyarakat
5. Pelaksanaan kegiatan
6. Advokasi kebijakan
7. Politisasi

Kedua hal tersebut di atas sejalan dengan yang dinyatakan Suzuki (1984) dalam Theresia, et al (2014) bahwa metode pembangunan berbasis masyarakat merupakan upaya untuk mengubah perilaku penerima manfaat, baik pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Dengan demikian metode yang dilakukan harus dapat merangsang masyarakat melakukan semua hal tersebut secara sadar dan suka-hati demi perbaikan mutu hidupnya sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Arsitek komunitas Asia yang tergabung dalam *Community Architect Network* (CAN) merumuskan pendekatan alternatif dalam penanggulangan masalah yang muncul di permukiman informal melalui pengorganisasian masyarakat. Dalam pendekatan ini terdapat dua struktur utama yang menjadi dasar untuk melakukan pengembangan dan pengorganisasian masyarakat:

1. Struktur sosial
Melalui pertemuan komunitas, berbagi dan mengenal satu sama lain - membentuk

kelompok tabungan dan tim kerja - berbagi tanggung jawab - berkoordinasi dengan *stakeholder* lainnya - bekerja dan belajar - membangun cara hidup bersama.

2. Struktur fisik
Melalui pemetaan dan survei masyarakat - mengidentifikasi tujuan peningkatan dan pengembangan - desain partisipatif dan proses perencanaan - mengedepankan rencana komunitas - proses konstruksi - hingga tercapainya *liveable community* (*Community Architect Handbook*, 2012).

Metode

Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data terkait pengaruh proses pembangunan yang dilakukan secara mandiri oleh Paguyuban Kalijawi sebagai salah satu proses pembangunan dalam upaya menyumbangkan perbaikan kawasan perkotaan adalah dengan mewawancarai beberapa responden, observasi lapangan, dokumentasi terhadap temuan yang didapat, dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada anggota dan pengurus Kalijawi serta lembaga Arkom Jogja. Observasi juga dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan pada permukiman warga yang sudah dilakukan pembangunan. Dokumentasi kondisi lingkungan di sekitar yang berhubungan dengan permukiman informal warga dilakukan dengan pengambilan beberapa foto. Data literatur didapat dari buku dan internet.

Metode menganalisis adalah dengan mengorganisasikan data primer yang diperoleh di lapangan dengan data

sekunder dari buku dan internet. Data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Pembahasan

Paguyuban Kalijawi

Paguyuban Kalijawi adalah organisasi masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai Gajahwong dan Winongo. Paguyuban ini sebagian besar beranggotakan ibu-ibu yang membentuk kelompok kecil. Setiap kelompok beranggotakan maksimal 10 orang. Berdirinya organisasi masyarakat ini didasarkan pada masalah yang mereka rasakan bersama seperti; legalitas tanah yang mereka bangun untuk permukiman, tidak baiknya sanitasi dan drainase pada permukiman mereka, kerentanan ekonomi yang mereka hadapi, kesehatan, dan sampah yang membuat permukiman menjadi kawasan kurang layak huni. Kesemua masalah tersebut di atas didapat dari hasil pemetaan yang dilakukan Arkom Jogja di 31 RT yang tersebar di bantaran Kali Gajahwong dan Winongo.

Sejauh ini Paguyuban Kalijawi difasilitasi oleh Arkom Jogja yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap masalah perkotaan. Oleh karena itu kegiatan Paguyuban Kalijawi dan Arkom Jogja adalah usaha kolaborasi untuk memperjuangkan hak dasar masyarakat informal perkotaan yang belum dapat mengakses hak dasarnya. Hal ini karena masalah administratif pemerintah yang selalu menggunakan sistem formal sebagai acuan dalam menjalankan program. Sedangkan masyarakat pada bantaran sungai adalah masyarakat yang hidup dengan sistem informal. Maka tujuan jangka panjang yang ingin diwujudkan paguyuban ini adalah dapat mengakses lahan formal sebagai tempat hidup mereka yang lebih layak. Prinsip kerja ini adalah adopsi dari gerakan serupa di beberapa negara Asia yang tergabung dalam *Asian Coalition for Housing Right* (ACHR) dan Paguyuban Kalijawi sudah menjadi salah satu bagiannya.

Kegiatan yang dilakukan Paguyuban Kalijawi ini seutuhnya dimaksudkan untuk bagaimana komunitas secara bersama-sama memperjuangkan hak atas kebutuhan dasarnya dengan pendekatan berbasis masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Theresia, et al (2014) menegaskan bahwa pembangunan dari bawah (*bottom-up*) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinisiatif sejak perencanaan, dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, serta cara-cara terbaik yang cocok dengan kondisi mereka. Pembangunan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat ini adalah usaha untuk menguatkan nilai tawar untuk mendapat dukungan kebijakan yang berpihak kepada



Gambar 2. Peta sebaran kelompok anggota Paguyuban Kalijawi di Kota Yogyakarta
 Sumber: Arkom Jogja, 2014

kepentingan masyarakat. Saat ini Paguyuban Kalijawi beranggotakan 23 kelompok dengan jumlah anggota 276 yang bekerja di 13 kampung sepanjang bantaran sungai Winongo dan Gajahwong.

Kegiatan Paguyuban Kalijawi

Organisasi

Untuk menjalankan paguyuban atau organisasi masyarakat ini dibutuhkan kepengurusan. Kepengurusan terdiri dari perwakilan tiap kelompok tabungan yang merupakan warga asli pada masing-masing kawasan. Tujuan paguyuban ini agar dapat memfasilitasi secara kolektif tindakan bersama yang sudah direncanakan. Oleh karena itu fungsi paguyuban ini bukan hanya sebagai kepengurusan suatu organisasi tetapi juga sebagai pranata sosial. Soetomo (2013) menyatakan bahwa tindakan kolektif seperti ini adalah cermin kapasitas masyarakat dalam melakukan pengelolaan pembangunan secara mandiri, sejak identifikasi kebutuhan dan masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pembangunan. Tindakan bersama tersebut menjadi sebuah rutinitas sehingga membentuk perilaku masyarakat yang terpolo dan terlembagakan.



Gambar 3. Susunan pengurus Paguyuban Kalijawi

Sumber: Arkom Jogja, 2015

Tabungan

Tabungan adalah salah satu hal yang dilakukan Paguyuban Kalijawi sebagai usaha menyelesaikan masalah ekonomi dan fisik mereka secara mandiri.

Sistem yang dibentuk dibuat bersama-sama oleh segenap anggota dengan difasilitasi Arkom Jogja beserta tim ahli ekonomi. Sistem yang ada saat ini merupakan sistem yang telah disepakati bersama supaya tidak memberatkan semua anggota. Sifat tabungan ini adalah dana bergulir melalui dana stimulan yang diberikan oleh *Asian Coalition Community Action (ACCA) project* sebesar 3000 USD.

Kelompok	Tgl Pembukaan Kali Jawi	Nominal	Rekening Kali Jawi	Nominal
Kawah	9-Nov-12	2.160.000	20-Nov-12	2.160.000
Kawah	17-Dec-12	1.350.000	13-Dec-13	1.350.000
Kawah	05-Feb-13	1.080.000	06-Feb-13	1.080.000
Kawah	25-Feb-13	1.080.000	11-Mar-13	1.080.000
Kawah	05-Mar-13	1.080.000	11-Mar-13	1.080.000
Total		6.750.000		6.750.000

Gambar 4. Bukti angsuran dan tabungan jaringan Paguyuban Kalijawi

Sumber: Arkom Jogja, 2013

Tabungan dibedakan menjadi 2, yaitu tabungan renovasi dan tabungan infrastruktur. Tabungan renovasi sebesar dua ribu (Rp 2000) rupiah perhari sedangkan untuk tabungan infrastruktur sebesar seribu (Rp 1000) rupiah perhari. Keseluruhan uang tabungan ini dikelola sepenuhnya oleh pengurus Paguyuban Kalijawi dengan pengawasan dari semua anggota. Uang tabungan disimpan dalam bank dengan atas nama Paguyuban Kalijawi. Semua anggota juga memiliki buku tabungan yang digunakan untuk mencatat kronologi sirkulasi uang. Rekening koran yang diterbitkan oleh bank juga akan diberikan kepada setiap kelompok secara periodik. Menurut ketua Paguyuban Kalijawi (2016), sampai dengan saat ini tabungan semua anggota sudah mencapai kurang lebih enam ratus (Rp 600.000.000) juta

rupiah yang digunakan untuk menghidupi kegiatan dan program yang telah disusun paguyuban.

Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan Paguyuban Kalijawi ini meliputi dua hal, yaitu pembangunan secara fisik kawasan berupa infrastruktur dan renovasi rumah serta pembangunan kapasitas masyarakat dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Metode ini didapat berdasarkan pengalaman pemetaan awal yang dilakukan oleh Arkom Jogja pada tahun 2010 yang menyimpulkan bahwa permasalahan yang hadir pada kawasan informal perkotaan adalah masalah fisik dan sosial. Hal ini juga sejalan dengan Arsitek komunitas Asia yang tergabung dalam *Community Architect Network (CAN)* merumuskan pendekatan alternatif untuk penanggulangan masalah yang muncul permukiman informal melalui pengorganisasian masyarakat secara fisik dan sosial (*Community Architect Handbook*, 2012).

1. Kegiatan pembangunan fisik permukiman melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pemetaan

Proses membuat peta secara spasial yang berisi potensi dan masalah fisik serta sosial digambarkan dalam sebuah peta sehingga dapat terlihat sebarannya. Dari situ masyarakat melihat segala potensi dan masalah tersebut secara kolektif dan menjadi keresahan bersama. Penentuan prioritas yang akan dilakukan baik pembangunan fisik maupun sosial berdasarkan skoring yang dapat terlihat di

dalam peta yang dibuat warga sendiri.



Gambar 5. Pemetaan di Gampingan RT 47
Sumber: Arkom Jogja, 2015

b. Perencanaan

Berdasarkan peta yang telah dikaji bersama, masyarakat beserta Arkom Jogja sebagai fasilitator melakukan perencanaan bersama terhadap solusi yang telah warga sepakati untuk menyelesaikan masalah mereka. Kegiatan selanjutnya akan Arkom Jogja ambil yaitu dengan menggambarkan hasil kesepakatan perencanaan tersebut dalam gambar teknis sebagai acuan pembangunan fisik. Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan pemebentukan tim pembangunan akan dibahas lagi ditingkatkan warga jika gambar kerja telah selesai.



Gambar 6. Hasil perencanaan kawasan Sambirejo RT 06
Sumber: Arkom Jogja, 2016

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan secara fisik dikelola oleh tim pembangunan yang telah dibentuk. Biasanya proses pengerjaan akan dilakukan dengan sistem gotong-royong 3. yang memungkinkan semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi.



Gambar 7. Ibu-ibu di ledok Pakuncen memasukan adonan mortar kedalam struktur bambu

Sumber : Arkom Jogja, 2014

d. Evaluasi

Evaluasi selalu dilakukan pada tingkat masyarakat sebagai langkah apresiasi terhadap proses yang telah dilakukan. Proseslah yang menjadi hal paling penting dilihat. Berdasarkan hal ini masyarakat dapat melihat sejauh mana kerja kerja keras mereka dapat berhasil dan kritik yang membangun terhadap proses yang masih perlu dibenahi.

2. Pembangunan kapasitas sumber daya manusia dilakukan dengan melakukan berbagai program dalam bentuk pelatihan, diskusi, dan kunjungan ke jaringan komunitas yang sudah berhasil melakukan hal tertentu. Kegiatan tersebut di atas merupakan turunan dari hasil pemetaan yang telah dikaji bersama.

Hasil kajian tersebut adalah usaha untuk menyelesaikan masalah permukiman informal yang dapat diselesaikan menggunakan sistem atau manajemen yang dikelola masyarakat secara tertib.



Gambar 8. Pelatihan tukang ke India untuk belajar pembuatan bata tanpa dibakar

Sumber : Arkom Jogja, 2013

Advokasi

Advokasi dilakukan sebagai upaya untuk memberikan usulan alternatif dalam petaan kawasan informal perkotaan. Proses untuk mencapai dokumen perencanaan alternatif ini adalah proses yang telah dilakukan masyarakat, praktisi, dan akademisi. Diharapkan melalui hal ini dapat mempengaruhi kebijakan dan tercapainya pemenuhan hak dasar hidup dari pemerintah untuk masyarakat informal perkotaan.



Gambar 9. Penyerahan hasil workshop perencanaan bantaran Kali Winongo oleh warga kepada pemerintah Kota Yogyakarta

Sumber : Arkom Jogja, 2013

Arkom Jogja

Lembaga Arkom Jogja adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan mendedikasikan diri bekerja bersama komunitas (arsitek komunitas) sebagai respon terhadap gejala sosial yang terjadi. Sejauh ini Arkom Jogja banyak bekerja di kawasan permukiman kumuh kota, kota pusaka, dan kawasan rawan bencana. Hampir mayoritas dilakukan di kawasan urban dimana banyak terjadi fenomena masyarakat sebagai dampak dari urbanisasi. Arsitektur adalah media yang digunakan untuk mengorganisir masyarakat. Pengorganisasian ini dirasa penting dilakukan karena hanya dengan bersama sama masyarakat yang lemah ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Arkom Jogja yang bekerja dengan prinsip bahwa masyarakatlah yang menjadi subyek pembangunan. Metode kerja dalam proses pembangunan fisik dan sosial suatu komunitas adalah dengan melakukan pemetaan-perencanaan-pelaksanaan- dan evaluasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Dalam setiap tahapannya peran serta komunitaslah yang diutamakan sehingga terbentuk pengetahuan kolektif, sikap yang kolektif dan saling menghormati, keterbukaan dengan nilai dan norma tertentu yang disepakati bersama.

Menurut Boonmahathanakorn, et al (2012), peran arsitek tidak sekadar aspek teknis merancang kawasan tetapi juga harus melihat hubungan masyarakat dengan konteks sosialnya. Pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat ini akan meningkatkan kesadaran warga dengan hubungan timbal balik antar masyarakat dan interaksinya dengan ruang yang mereka tinggali. Dengan demikian, pemetaan yang komprehensif dapat menjadi alat penting untuk

menemukan makna dari "hidup bersama" melalui cara berdiskusi, perencanaan dan berbagi bersama-sama, mengidentifikasi apa yang telah membuat masyarakat hidup dengan baik bersama-sama sejauh ini, dan bagaimana hal itu dapat dipertahankan dan dibangun di masa depan. Pemetaan dapat mendukung penentuan nasib sendiri dan dalam jangka panjang dapat berkontribusi terhadap proses demokratisasi dari bawah. Dengan demikian, pemetaan tidak hanya produk akhir - itu juga sebuah proses, dan outputnya dapat meningkatkan pemahaman tentang hubungan orang dengan tempat hidup mereka.



Gambar 10. Pertemuan regional Arsitek Komunitas Indonesia serta jaringan *Community Architect Network Thailand* dan Filipina

Sumber: Arkom Jogja, 2013

Pengaruh kegiatan yang dilakukan Paguyuban Kalijawi terhadap pembangunan fisik perkotaan

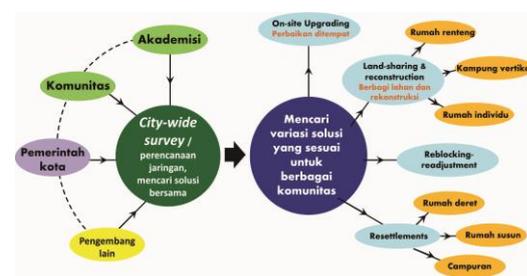
Pembangunan pada umumnya diselenggarakan oleh pemerintah dan investor. Namun kali ini Paguyuban Kalijawi mencoba melakukan inovasi dalam pembangunan pada kawasan informal yang dapat menjadi salah satu solusi penanganan kawasan kumuh perkotaan. Perencanaan dan pembangunan yang pada umumnya bersifat parsial kini dilakukan dengan beberapa sampel pada kawasan informal bantaran sungai yang menjadi representatif kawasan tersebut. Dengan

skema tabungan yang dimiliki Paguyuban Kalijawi maka kegiatan ini dapat didanai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Sehingga pada awalnya, hal ini sebagai usaha pembuktian hasil kerja keras masyarakat yang dapat dilakukan secara mandiri.

Workshop dalam *city-wide survey* dilakukan sebagai langkah dalam melakukan perencanaan dan pembangunan kawasan. Tim ahli dari berbagai bidang, praktisi, akademisi, dan masyarakat melakukan proses ini bersama-sama. Kesepakatan dan hasil perencanaan ini dapat menjadi kekuatan nilai tawar bagi masyarakat untuk dapat berdiskusi dengan pemerintah. Semangat Paguyuban Kalijawi bukanlah untuk memformalkan kawasan bantaran sungai, tetapi bagaimana proses pembangunan yang mereka lakukan dapat diakui oleh pemerintah sehingga dapat mempengaruhi kebijakan. Harapannya kebijakan tersebut akan membantu masyarakat mendapatkan hak dasarnya, terlebih soal bermukim.

Sejauh ini Paguyuban Kalijawi telah dapat membangun 4 balai warga di kampung Jatimulyo, Sidomulyo, Pakuncen, dan Papringan, pembuatan jalan paving blok di kampung Mrican (bekerjasama dengan pemerintah), Saudagaran (bekerjasama dengan pemerintah), dan Sidomulyo. Infrastruktur lain yang dibangun adalah pembuatan talud sungai di Sidomulyo (bekerjasama dengan pemerintah), talud tebing di Pakuncen, dan bronjong tepi sungai di kampung Sambirejo. Selain hal tersebut diatas Paguyuban Kalijawi juga telah berhasil melakukan perbaikan rumah anggotanya sejumlah 165 rumah dan yang bukan anggota melalui program *descent poor* 25 rumah dan program rumah renteng 10

rumah yang tersebar di 13 kampung di kawasan perkotaan Yogyakarta.



Gambar 11. Skema hubungan pembangunan antara pemangku kepentingan dalam proses pembangunan kawasan informal perkotaan
 Sumber: Arkom Jogja, 2013

Pengaruh kegiatan yang dilakukan Paguyuban Kalijawi terhadap pembangunan sosial perkotaan

Pembangunan jika dimaknai hanya pembangunan fisik saja akan menjadi kurang bermakna (Theresia et al, 2014). Masyarakat adalah modal utama dalam melakukan pembangunan. Karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan merencanakan dan membangunnya. Oleh karena itu pembangunan juga perlu dilakukan pada tingkat sosial budaya masyarakat itu sendiri. Peningkatan kapasitas setiap individu dalam hal berfikir, bersikap, dan bertindak perlu difasilitasi agar dapat menjadi lebih baik. Oleh karena itu dilakukan program pembangunan dari segi sosial yang dilakukan oleh Paguyuban Kalijawi dalam rangka meningkatkan pendidikan kritis masyarakat beserta pelatihan dalam hal spesifik tertentu seperti, kesehatan alternatif, manajemen keuangan rumah tangga, dan nilai penghargaan terhadap alam serta lingkungan.

Hal ini akan membentuk pengetahuan secara kolektif dan dapat berkembang menjadi pengetahuan lokal. Prosesnya adalah dengan bekerja dan belajar

sehingga akan lebih mudah masyarakat terima, pahami, dan evaluasi. Selain itu kemampuan melihat fenomena yang terjadi dengan kritis menjadi tujuannya. Agar paguyuban yang makin lama makin besar dapat menjadi representatif anggotanya yang dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Kegiatan yang dilakukan Paguyuban Kalijawi ini dapat dinilai sebagai gerakan sosial yang menjangkau masyarakat yang ada di bantaran Kali Gajahwong dan Winongo untuk melakukan usaha pembangunan secara mandiri. Hal ini terjadi karena mereka tidak dapat mengakses program pemerintah karena alasan administratif. Pembangunan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah dan investor, pada saat ini dapat dilakukan oleh masyarakat informal perkotaan. Usaha ini terus dilakukan untuk memperjuangkan hak dasar hidup mereka yang salah satunya adalah hak bermukim.

Pembangunan dan perbaikan permukiman yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok masyarakat kecil-informal merupakan kontribusi dan inovasi yang penting dalam penentuan wajah kota dan peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakatnya. Kontribusi dan inovasi penting ini jarang mendapat pengakuan dalam cara pandang dominan yang menganggap bahwa pelaku utama pembangunan kota adalah pemerintah dan kalangan investor.

Daftar Pustaka

Boonmahathanakorn, S., Luansang, C., Archer, D. (2012). Facilitating community mapping and planning

for citywide upgrading: The role of community architects. *Journal Environment and Urbanization*, 24, 115-129.

Haris, D. M. (2011). Strategi pengembangan usaha sektor informal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di perkotaan. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*, LAB-ANE FISIP Untirta, 239-245.

Mikkelsen, B. (2001). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya pemberdayaan: Sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Montgomery, M. R. (1988). How large is too Large? Implication of the city size literature for population policy and research. *Economic Development and Cultural Change*, 36, 691-720.

Perroux, F. (1950). Economic space, theory and application. *Quarterly Journal of Economics*, 64.

Soetomo, (2013). *Pemberdayaan masyarakat: Mungkinkah muncul antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P.G.P., Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat: Acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pembangunan masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.